

>> PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR <<

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**



LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2023**

- Jl. Lawu No.167 Karanganyar
- dp3appkb@karanganyarkab.go.id
- 0271495063 Fax 495063

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN..... 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL..... 3

DAFTAR GAMBAR 4

KATA PENGANTAR..... 5

IKHTISAR EKSEKUTIF 7

PENDAHULUAN 9

A. Latar Belakang 9

B. Gambaran Umum 11

1. Tugas Pokok dan Fungsi..... 11

2. Struktur Organisasi..... 12

3. Sumber Daya..... 13

3.1 Sumber Daya Manusia..... 13

3.2 Sumber Daya Modal 13

4. Anggaran 13

C. Isu Strategis..... 15

D. Dasar Hukum..... 15

E. Sistematika Penulisan 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 20

A. Perencanaan Kinerja..... 20

B. Program Unggulan..... 23

1. Program Umum/Rutin..... 24

2. Program yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 24

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 29

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran 31

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 31

F. Perjanjian Kinerja (PK) 32

G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja..... 34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. Metode Pengukuran 36

B. Capaian Kinerja Organisasi 38

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan..... 39

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 42

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 46

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 57

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian 61

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Program..... 73

C. Akuntabilitas Anggaran 78

1. Anggaran Belanja..... 78

2. Realisasi Anggaran 88

BAB IV PENUTUP..... 95

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja..... 95

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang..... 14

Tabel 1.3 Sumber Daya Modal 14

Tabel 1.4 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 15

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 22

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 23

Tabel 2.3 Skema Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja..... 30

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian
Sasaran Tahun 2023..... 31

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023..... 32

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023..... 33

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 37

Tabel 3.2 Sumber Penilaian Indikator Kinerja 38

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 39

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2019-2023..... 43

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2022 dan 2023 terhadap
Target Jangka Menengah (RPJMD) 47

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi..... 58

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian 61

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Dan Efektif Tahun Anggaran 2023 63

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program 73

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023..... 79

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023.. 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar..... 13

Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... 40

Gambar 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nilai Capaian Tinggi Tahun 2023..... 41

Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nilai Capaian Sangat Tinggi Tahun 2023 41

Gambar 3.4 Capaian Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD 49

Gambar 3.5 Capaian Realisasi Indikator Prosentase ARG Terhadap APBD Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD 50

Gambar 3.6 Capaian Realisasi Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD..... 51

Gambar 3.7 Capaian Realisasi Indikator Kekerasan Perempuan Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD..... 52

Gambar 3.8 Capaian Realisasi Indikator Kekerasan Anak Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD 53

Gambar 3.9 Capaian Realisasi Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD 55

Gambar 3.10 Capaian Realisasi Indikator Prosentase Tribina Aktif Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD 57

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-V (lima) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Dalam dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang

sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi serta mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Karanganyar, Februari 2024

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR



RUSMANTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199303 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah **“Mewujudkan Penduduk**

Tumbuh Seimbang, Kesetaraan Gender dan Perlindungan perempuan dan Anak”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja / Perjanjian kinerja Tahun 2023 untuk mencapai Sasaran Strategis pada seluruh kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai nilai kinerja yang dikategorikan baik.

Guna memempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan, upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik urusan-urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja

tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, upaya pemenuhan hak-hak anak sedangkan perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya preventif dan rehabilitasi kasus kekerasan melalui pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menitikberatkan pada kesehatan reproduksi melalui pendekatan pendewasaan usia perkawinan dan keluarga berencana itu sendiri melalui pendekatan PUS sebagai peserta aktif keluarga berencana.

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuang pada Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB);
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) tahun berikutnya.
4. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
6. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113) dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

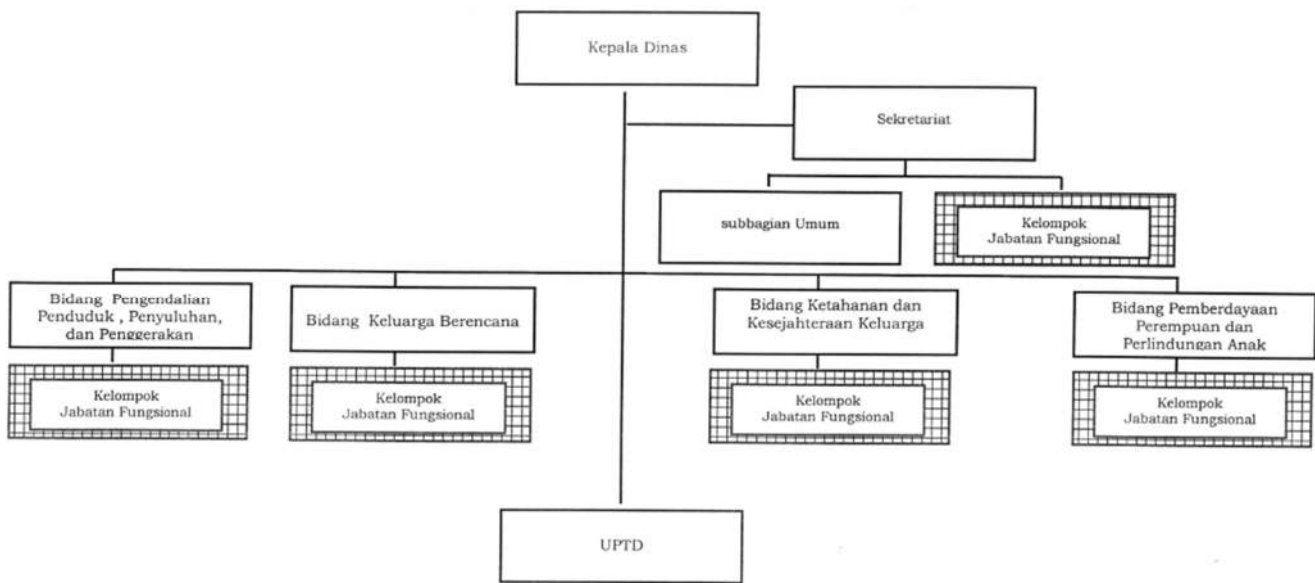
- a. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan kelompok Jabatan Fungsional

- i. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- j. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- k. UPTD
- l. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi - Misi yang ditetapkan, didukung oleh 30 orang pegawai yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang (Eselon III) sebagai pelaksana teknis.

- Sekretaris membawahi 1 orang Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional dan masing-masing Kepala Bidang membawahi kelompok jabatan fungsional.
- Kepala Bidang dibantu kelompok jabatan fungsional sebagai sub koordinator dan dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya
- Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari pendidikan SLTA sampai pendidikan S2 sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	12	3	9
2	S1	13	2	11
3	DIII	4	1	3
4	SLTA	1	1	0
Jumlah		30	7	23

b. Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang :

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	4	1	3
3	III	16	3	13
4	IV	10	3	7
Jumlah		30	7	23

3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 1.3 Sumber Daya Modal

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
1	Gedung kantor (± 1.800 m²)	1	Unit
2	Mobil Kepala Dinas	1	Unit
3	Mobil Operasional Dinas	4	Unit
4	Sepeda Motor Petugas PLKB	45	Unit
5	Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)	2	Unit
6	Komputer PC	48	Buah
7	Laptop	54	Buah

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
8	LCD	12	Buah
9	Over Head	2	Buah
10	Kamera	9	Buah
11	Tablet HP	2	Buah
Sarana Pelayanan			
1	Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan	16	Unit
2	Gedung Gudang Alat Kontrasepsi	1	Unit
3	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)	1	Unit
4	Mobil Pelayanan Operasi KB	1	Unit
5	Mobil Penerangan KB (Mupen)	2	Unit
6	Mobil Operasional KB (Truk Box)	2	Unit

4. Anggaran

Pada tahun 2023 sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel 1.4 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sumber	Tahun	Jumlah
1	APBD	2022	Rp 7.044.485.250
2	APBD	2023	Rp 8.079.855.280
3	APBN (DAK Fisik dan Non Fisik)	2022	Rp 9.336.129.000
4	APBN (DAK Fisik dan Non Fisik)	2023	Rp 11.691.875.000

C. Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Peningkatan kesetaraan gender;

- b. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak;
- c. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang.

2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Peningkatan kesertaan keluarga berencana;
- b. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi, permasalahan pembangunan yang dihadapi tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
- 2) menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
- 3) meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 4) meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi;
- 5) meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
- 6) mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
- 7) menyediakan data dan informasi keluarga;
- 8) mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
- 9) meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
- 10) mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 12) meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;

- 13) mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana dan akuntabel;
- 14) meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

D. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2) Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4) Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

- 11) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12) Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 13) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP pembangunan yang dapat dikembangkan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Isu Strategis Yang Dihadapi, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang terdiri dari :

A. Perencanaan Kinerja terdiri atas :

1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

B. Program Unggulan terdiri atas :

1. Program Umum/Rutin
2. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

C. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

F. Perjanjian Kinerja

G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja terdiri atas :

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
2. Cascading dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

3. Cross Cutting Perangkat Daerah

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 diakomodir dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. Dokumen rencana strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis membantu Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mendukung melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.

Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang, (2) bersama, (3) memajukan, (4) Karanganyar. Makna “berjuang” yaitu Pemerintah daerah berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Makna “bersama” yaitu suatu proses dimana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur, (2) Maju di bidang ekonomi, (3) Maju di Kualitas Sumber

Daya Manusia, (4) Maju di Pembangunan Desa, (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan partisipatif. Dan kata Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar

Untuk mewujudkan visi tersebut dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	✓ Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana ✓ Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	✓ Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR ✓ Prosentase Tribina Aktif
2	Misi 5: Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	✓ Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan ✓ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓ IDG (Indeks Pemberdayaan an Gender) ✓ Prosentase ARG terhadap APBD ✓ Kekerasan perempuan ✓ Kabupaten Layak Anak ✓ Kekerasan Anak

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak						
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,52	74,66	74,71	74,81	74,95
2		Prosentase ARG terhadap APBD	13,5	14	6,5	7	7,5
3		Kabupaten Layak Anak	742	752	762	770	780
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0084	0,0067	0,0053	0,0047	0,0043
5		Kekerasan Anak	0,0023	0,0061	0,0088	0,0080	0,0076
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas						
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75	75,1	75,2	75,5	76
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	84	85	88	90	91

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DP3APPKB. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kabupaten Karanganyar.

1. Program Umum/Rutin

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iv. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan Mebel
 - ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - ii. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan sub kegiatan :
 - i. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - ii. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - iii. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - iv. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan :
 - i. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - ii. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - iii. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - iv. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - v. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - vi. Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan :
 - i. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - ii. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - iii. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - iv. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - v. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - vi. Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan :

- i. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- ii. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan :

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :

- i. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- ii. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- iii. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- iv. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- v. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :

- i. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- ii. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- iii. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan DP3APPKB tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Skema Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	✓ Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana ✓ Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	✓ Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR ✓ Prosentase Tribina Aktif	✓ CPR = 76% ✓ Prosentase Tribina Aktif = 91%
2	Misi 5: Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	✓ Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan ✓ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓ IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) ✓ Prosentase ARG terhadap APBD ✓ Kekerasan perempuan ✓ Kabupaten Layak Anak ✓ Kekerasan Anak	✓ IDG = 74,95 ✓ Prosentase ARG terhadap APBD = 7,5% ✓ Kekerasan perempuan = 0,0043% ✓ Kabupaten Layak Anak = 780 ✓ Kekerasan Anak = 0,0076%

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 adalah:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2023

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	16
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	2
3	Program Perlindungan Perempuan	2	4
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	1
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	2
6	Program Perlindungan Khusus Anak	3	3
7	Program Pengendalian Penduduk	2	5
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4	17
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	8
TOTAL		24	56

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada rencana strategis sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk

menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2023 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak			
Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	1	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	74,95
	2	Prosentase ARG terhadap APBD	7,5
	3	Kabupaten Layak Anak	780
Menurunnyak asus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Kekerasan perempuan	0,0043
	2	Kekerasan anak	0,0076
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas			
Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana	1	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	76,00
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Prosentase tribina aktif	91,00

F. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dari anggaran yang terbatas, sehingga diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan bisa maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak				
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,95	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 70.000.000
		Prosentase ARG terhadap APBD	7,5		
		Kabupaten Layak Anak	780	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 105.000.000

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran
2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0043	Program Perlindungan Perempuan	Rp 35.000.000
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 100.000.000
		Kekerasan Anak	0,0076	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 60.000.000
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas				
3	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	76	Program Pengendalian Penduduk	Rp 375.640.000
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.796.183.300
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	91	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 5.058.400.000
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	79,35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.196.506.980

G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

a. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Cascading dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Pada pohon kinerja,

proses perincian atau spesifikasi penyebab masalah diubah menjadi kinerja. Sama halnya seperti pada proses *cascade*, dalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban.

c. Cross Cutting Perangkat Daerah

Cross Cutting menggunakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan sama yang menjadi fokusnya dan digunakan sebagai pedoman dalam mengukur keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun kelima di tahun 2023. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“Berjuang bersama memajukan Karanganyar”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

A. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

REALISASI

TARGET

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

TARGET - (REALISASI - TARGET)

TARGET

X 100%

atau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

(2 X TARGET) - REALISASI

TARGET

X 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Skala Nilai	Kategori/Interpretasi
≥ 91 s.d ≤ 100	Sangat Tinggi
≥ 76 s.d ≤ 90	Tinggi
≥ 65 s.d ≤ 75	Sedang
≥ 51 s.d ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efesiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.2 Sumber Penilaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Sumber Penilaian
1	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Sumber data BPS
2	Prosentase ARG terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG (Anggaran Resposif Gender)}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
3	Kekerasan perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan Perempuan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$
4	Kabupaten Layak Anak	Skor dari jumlah indikator KLA tercapai
5	Kekerasan Anak	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan anak}}{\text{Jumlah anak usia kurang dari 18 tahun}} \times 100\%$
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
7	Prosentase Tribina Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tribina Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Kelompok Tribina}} \times 100\%$

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

- i. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
- ii. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak
- iii. Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

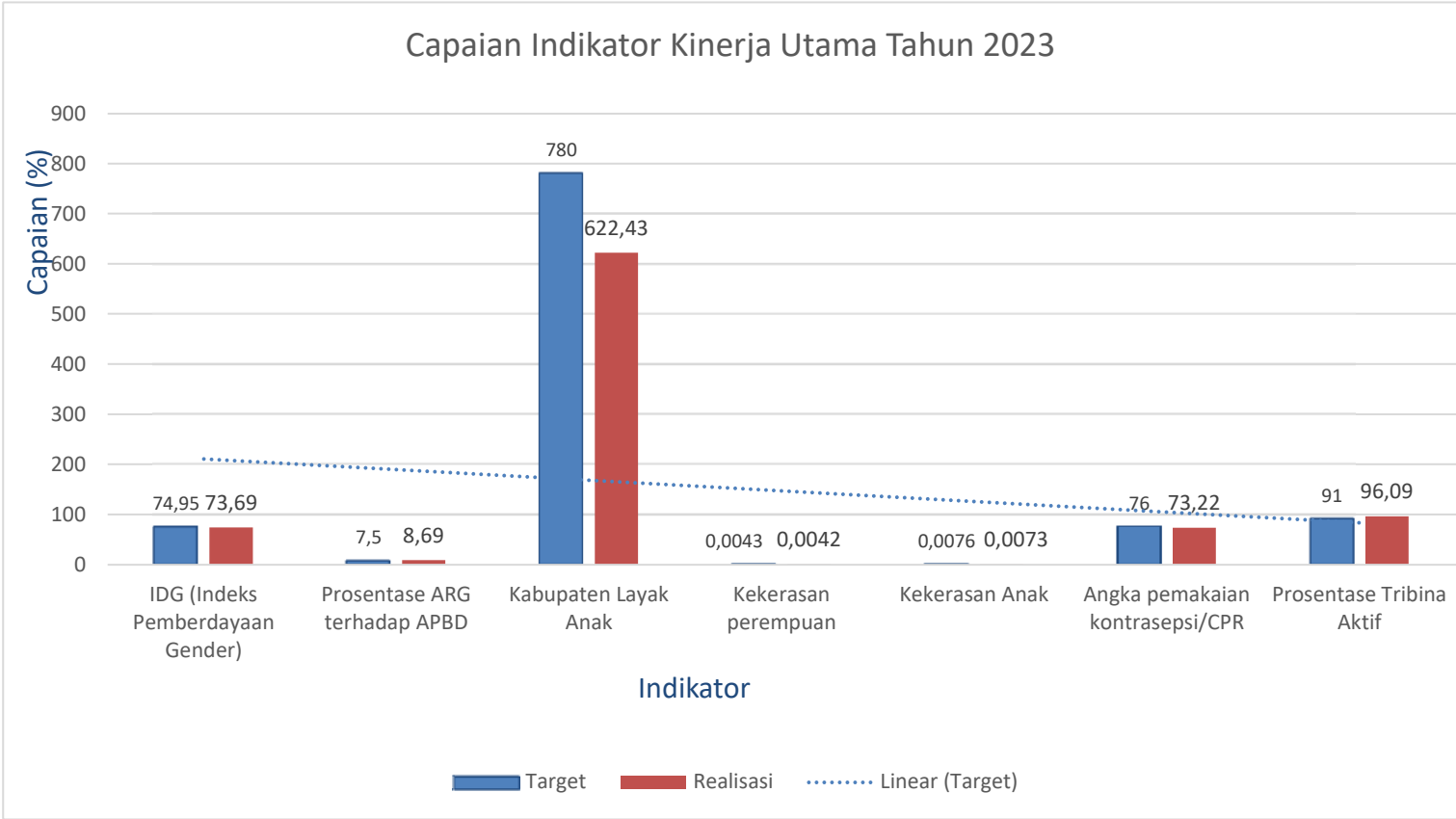
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan

Pengukuran capaian kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **100,31%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”** sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak				
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,95	73,69	98,32
2		Prosentase ARG terhadap APBD	7,5	8,69	115,87
3		Kabupaten Layak Anak	780	622,43	79,80
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0043	0,0042	102,33
5		Kekerasan Anak	0,0076	0,0073	103,95

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas				
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	76	73,22	96,34
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	91	96,09	105,59
Rata-rata					100,31



Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.3 dari tujuh Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kabupaten Karanganyar rata-rata capaian indikator kinerjanya 100,31 % yang artinya sangat tercapai. Berikut merupakan rincian hasil capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.



Gambar 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nilai Capaian Tinggi Tahun 2023

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai 76% hingga 90% termasuk ke dalam klasifikasi cukup tercapai. Berikut ini merupakan indikator-indikator yang memiliki nilai cukup tercapai.

a. Kabupaten Layak Anak

Penginputan evaluasi mandiri Kabupaten Layak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan dilakukan verifikasi administrasi serta penilaian oleh Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak.



Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nilai Capaian Sangat Tinggi Tahun 2023

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai 91% hingga 100% termasuk ke dalam klasifikasi tercapai kategori sangat tinggi. Berikut ini merupakan indikator-indikator yang memiliki nilai tercapai yaitu :

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Ketercapaian tersebut sudah termasuk klasifikasi yang berhasil, akan tetapi perlu ditingkatkan upaya kinerjanya.
- b. Prosentase ARG terhadap APBD
Hal ini berarti anggaran yang direncanakan telah mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
- c. Kekerasan Perempuan
Hal ini berarti pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang telah berhasil dilaksanakan.
- d. Kekerasan Anak
Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dalam lingkup Kabupaten telah terlaksana dengan baik.
- e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR
Ketercapaian tersebut sudah termasuk klasifikasi yang berhasil, tetapi perlu ditingkatkan upaya kinerjanya khususnya pada program pembinaan keluarga berencana.
- f. Prosentase Tribina Aktif
Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019-2023 menjelaskan tentang penjabaran indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar berdasarkan perkembangan hasil realisasi dan capaian kinerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berikut ini tabel yang memaparkan pencapaian indikator kinerja menyesuaikan dengan sasaran strategis beserta realisasi dan capaian kinerjanya.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021			2022			2023		
			Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak																
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,52	74,52	100	74,66	74,76	100,13	74,71	74,29	99,44	74,81	73,38	98,09	74,95	73,69	98,32
2		Prosentase ARG terhadap APBD	-	-	-	-	-	-	6,5	7,75	119,23	7	8	114,29	7,5	8,69	115,87
3		Kabupaten Layak Anak	742	742	100	752	-	-	762	757,9	99,46	770	642,35	83,42	780	622,43	79,80
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	-	-	-	0,0067	0,005	125,37	0,0053	0,004	124,53	0,0047	0,0046	102,13	0,0043	0,0042	102,33
5		Kekerasan Anak	-	-	-	0,0061	0,01	183,61	0,0088	0,0075	114,77	0,0080	0,0079	101,25	0,0076	0,0073	103,95

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021			2022			2023		
			Tar get	Reali sasi	% Cap aian	Tar get	Reali sasi	% Cap aian	Tar get	Reali sasi	% Cap aian	Tar get	Reali sasi	% Cap aian	Tar get	Reali sasi	% Cap aian
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas																
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75	78,77	105,03	75,10	74,94	99,79	75,25	75,15	99,87	75,5	71,57	94,79	76	73,22	96,34
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	-	-	-	85	88	103,53	88	95,17	108,15	90	95,27	105,86	91	96,09	105,59
	Rata-rata				101,68			122,49			109,35			99,98			100,31

Dari hasil pengukuran atas Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator IDG (Index Pemberdayaan Gender) mengalami kecenderungan tren data realisasi yang mengalami penurunan hingga 1,81% dari 100,13% di tahun 2020 menjadi 98,32% di tahun 2023. Hal tersebut sudah berarti cukup berhasil, sehingga perlu ditingkatkan sedikit untuk mencapai 100%.
2. Indikator Prosentase ARG terhadap APBD mengalami kecenderungan tren realisasi mengalami penurunan 3,36% dari tahun 2021 dan meningkat dengan peningkatan sejumlah 1,58% menjadi 115,87%. Peningkatan tersebut berarti sudah baik sehingga perlu dipertahankan kinerjanya.

3. Indikator Kabupaten Layak Anak mengalami kecenderungan tren realisasi kinerja yang menurun dari tahun 2021 sebesar 19,66% menjadi 79,80%. Meskipun demikian untuk predikatnya sudah naik, dari tahun 2021 tingkat Pratama di tahun 2022 dan 2023 tingkat Madya.
4. Indikator kekerasan perempuan mengalami kecenderungan kenaikan capaian kinerjanya yang berarti dengan kenaikan tingkat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan realiasi di tahun 2020 sebesar 0,005% menjadi 0,0042% di tahun 2023 yaitu dengan capaian 102,33%.
5. Indikator kekerasan anak mengalami kecenderungan kenaikan capaian kinerjanya yang berarti dengan kenaikan tingkat pencegahan kekerasan terhadap anak dengan realiasi di tahun 2020 sebesar 0,01% menjadi 0,0073% di tahun 2023 yaitu dengan capaian 103,95%.
6. Indikator Angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami tren data realisasi kinerja yang bersifat fluktuatif di 3 (tiga) tahun terakhir Realisasi kinerja di tahun 2020 menuju tahun 2021 dengan kenaikan sejumlah 0,02% menjadi 75,15% dengan capaian yang juga mengalami kenaikan sejumlah 0,08% menjadi 99,87%. Pada tahun 2021 menuju tahun 2022 terjadi penurunan realisasi kinerja sejumlah 3,58% menjadi 71,57% dengan capaian yang juga mengalami penurunan sejumlah 5,08% menjadi 94,79%. Dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sejumlah 1,65% dengan capaian 73,22% dengan capaian mengalami kenaikan 1,37% menjadi 96,34%. Hal tersebut berarti bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja untuk mewujudkan capaian yang sesuai dengan target.
7. Indikator Prosentase Tribina Aktif mengalami kecenderungan tren realisasi yang meningkat dengan peningkatan sejumlah 8,09% menjadi 96,09% dari tahun 2020. Hal tersebut juga berlaku untuk tren data capaian kinerja yang mengalami kenaikan sejumlah 2,06% dengan capaian di tahun 2023 menjadi 105,59%. Peningkatan tersebut berarti sudah baik sehingga perlu dipertahankan kinerjanya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar periode RPJMD 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2022 dan 2023 terhadap Target Jangka Menengah (RPJMD)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Capaian 2022(%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD (%)
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak								
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	73,38	98,09	74,95	73,69	98,32	74,95	98,32
2		Prosentase ARG terhadap APBD	8	114,29	7,5	8,69	115,87	7,5	115,87
3		Kabupaten Layak Anak	642,35	83,42	780	622,43	79,80	780	79,80
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0046	102,13	0,0043	0,0042	102,33	0,0043	102,33
5		Kekerasan Anak	0,0079	101,25	0,0076	0,0073	103,95	0,0076	103,95
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas								
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71,57	94,79	76	73,22	96,34	76	96,34
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	95,27	105,86	91	96,09	105,59	91	105,59
		Rata-Rata		99,98			100,31		100,31

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2023, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 2 (dua) tujuan dengan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Rencana Strategis 2018-2023 yaitu :

i. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan

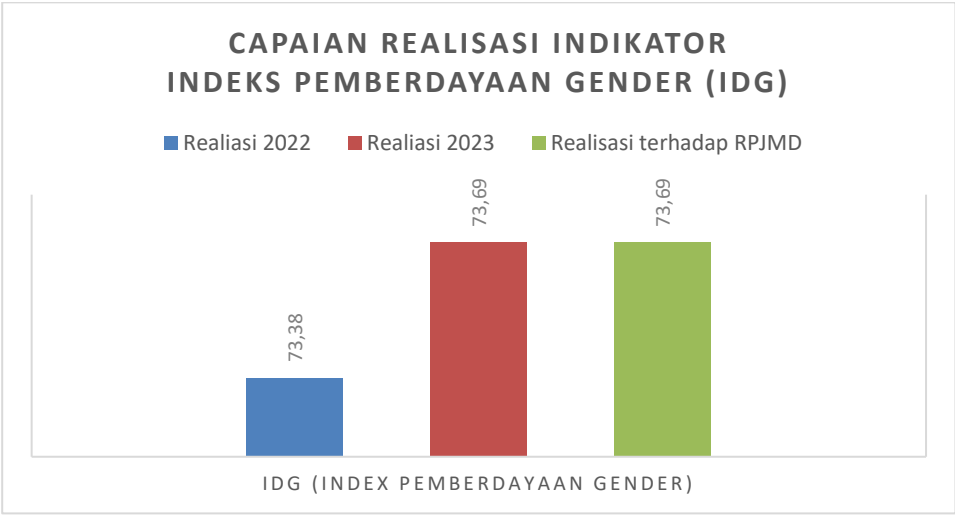
Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya yaitu kesenjangan partisipasi politik perempuan.

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif Gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menargetkan tahun 2023 sebesar 74,95 dan terealisasi 73,69 dengan capaian sasaran sebesar 98,32% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 98,32%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 belum mencapai target jangka menengah tetapi sudah dalam kategori tinggi, sehingga masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja untuk mewujudkan capaian yang sesuai dengan target (100%).

Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 ini meningkat 0,31 daripada tahun 2022 dengan kenaikan capaian sebesar 0,23%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih tinggi dan terdapat kenaikan daripada tahun 2022.



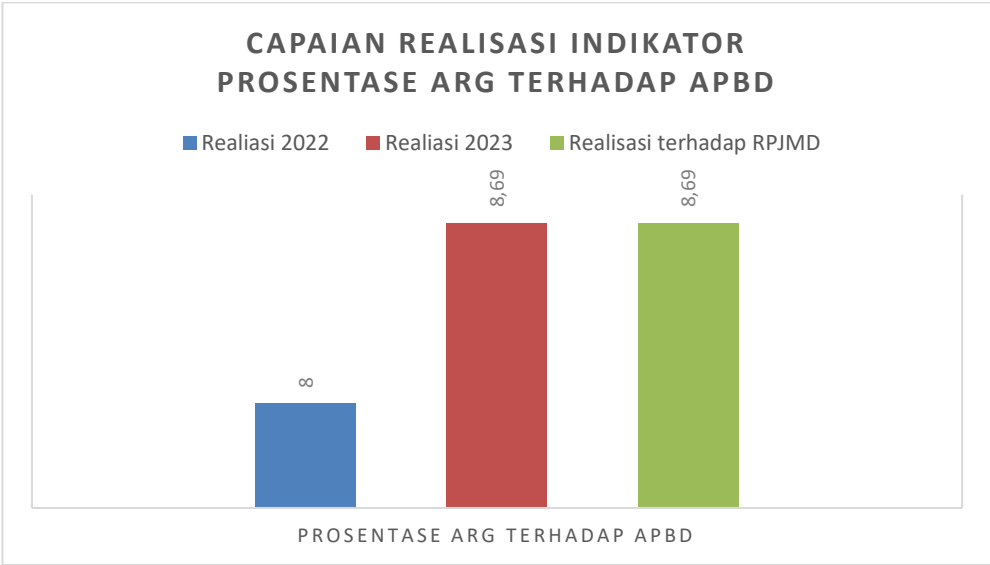
Gambar 3.4 Capaian Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

b. Prosentase ARG terhadap APBD

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. ARG diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh, yang dilakukan melalui analisis gender. Perhitungan Prosentase ARG terhadap APBD diukur dengan jumlah anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD dibagi dengan jumlah seluruh belanja langsung pada APBD dikalikan dengan 100%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menargetkan pada tahun 2023 sebesar 7,5% terealisasi sebesar 8,69% dengan capaian sebesar 115,87% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 115,87%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah tahun.

Realisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2023 ini meningkat 0,69% daripada tahun 2022 dengan kenaikan capaian sebesar 1,58%. Angka ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perolehan akses, manfaat dan partisipasi untuk menikmati hasil pembangunan bagi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karanganyar.



Gambar 3.5 Capaian Realisasi Indikator Prosentase ARG Terhadap APBD Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

c. Kabupaten Layak Anak

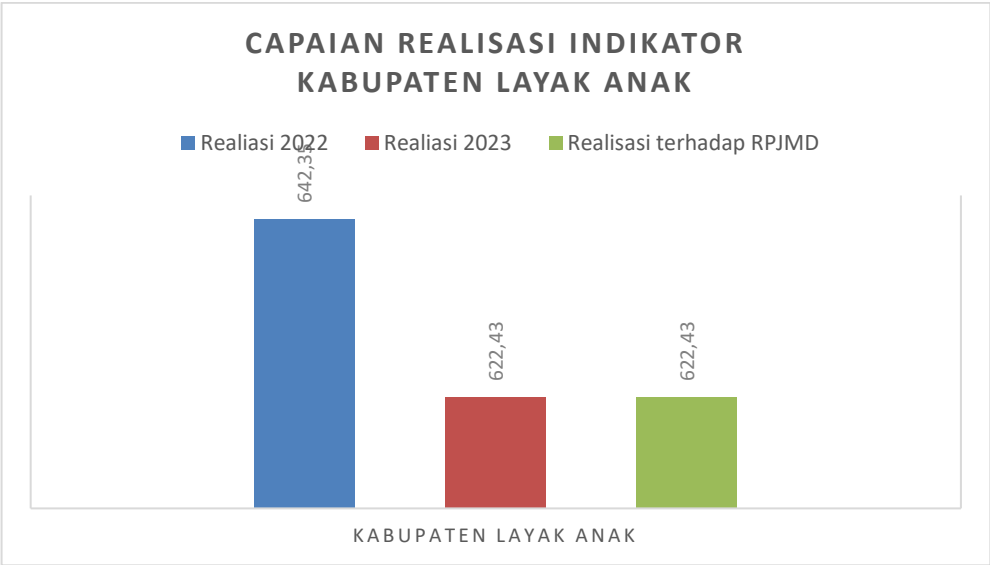
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Indonesia telah mengesahkan konfensi tentang hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

- i. hak sipil dan kebebasan;
- ii. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- iii. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- iv. pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- v. perlindungan khusus.

Penginputan evaluasi mandiri Kabupaten Layak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan dilakukan verifikasi administrasi dan penilaian oleh Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target skor Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2023 sebesar 780 dan terealisasi 622,43. Saat penginputan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak mencapai skor 924,8 namun setelah dilakukan verifikasi administrasi diperoleh skor 622,43. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 79,80% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 79,80%. Dibandingkan dengan tahun 2022 skor Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2023 mengalami penurunan skor sebesar 19,92 dengan penurunan capaian sebesar 3,62%. Meskipun skor yang diperoleh lebih rendah daripada tahun 2022 tetapi peringkat Kabupaten Layak Anak yang diperoleh masih dalam kategori Madya.



Gambar 3.6 Capaian Realisasi Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

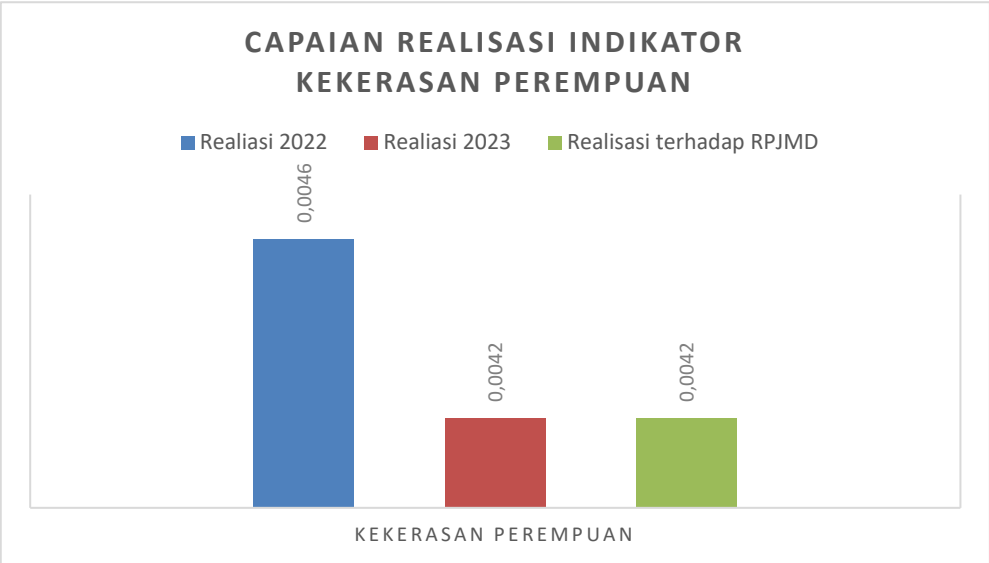
ii. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

a. Kekerasan terhadap perempuan

Perhitungan untuk kekerasan terhadap perempuan diukur dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebesar 0,0043 dan terealisasi sebesar 0,0042. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 102,33% dan terhadap target akhir RPJMD

sebesar 102,33%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah tahun.

Dibandingkan dengan tahun 2022 prosentase kekerasan perempuan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,0004% dan capaian meningkat 0,2%, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah berjalan dengan efektif.

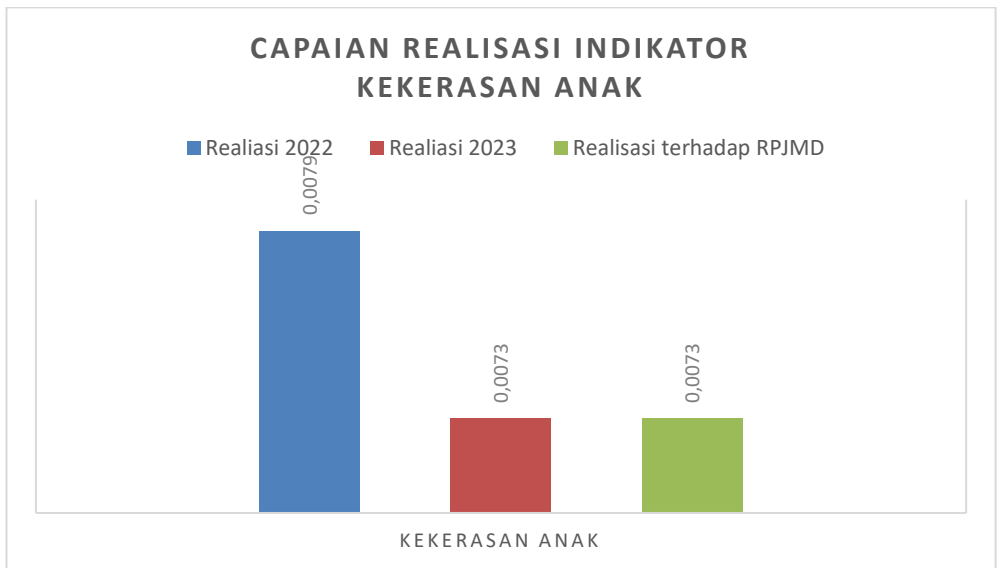


Gambar 3.7 Capaian Realisasi Indikator Kekerasan Perempuan Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

b. Kekerasan terhadap anak

Perhitungan untuk kekerasan terhadap anak diukur dengan jumlah kasus kekerasan anak dibagi dengan jumlah anak usia kurang dari 18 tahun dikali dengan 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target rasio kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 sebesar 0,0076 dan terealisasi 0,0073. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 103,95% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 103,95%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah tahun.

Dibandingkan dengan tahun 2022 prosentase kekerasan anak untuk tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,0006% dan capaian meningkat 2,7%, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak mengalami banyak penurunan dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak telah berjalan dengan efektif.



Gambar 3.8 Capaian Realisasi Indikator Kekerasan Anak Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

iii. **Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana**

a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, DP3APPKB berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Salah satu prasyarat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Berbagai tantangan pelayanan KB yang masih dihadapi adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Untuk itu, DP3APPKB berupaya menguatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.

Peningkatan pengendalian penduduk melalui program KB MKJP menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke

waktu. Peningkatan peserta KB baru MKJP merupakan salah satu komponen pengendalian penduduk yang mempunyai resiko kegagalan yang rendah. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sasaran strategis ini dimaksudkan agar DP3APPKB dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Karanganyar karena laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kuantitas penduduk. Laju pertumbuhan penduduk meningkat menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Tingkat pendapatan rendah menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan negara. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak membahayakan kemajuan dan kesejahteraan.

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program Bangga Kencana untuk mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Metode kontrasepsi menurut jangka waktu pemakaiannya dibagi atas dua kelompok, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metode kontrasepsi jangka pendek (Non-MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin tambah anak lagi. Jenis metode yang termasuk ke dalam MKJP adalah kontrasepsi mantap pria dan wanita (tubektomi dan vasektomi), Implant dan IUD(*Intra Uterine Device*).

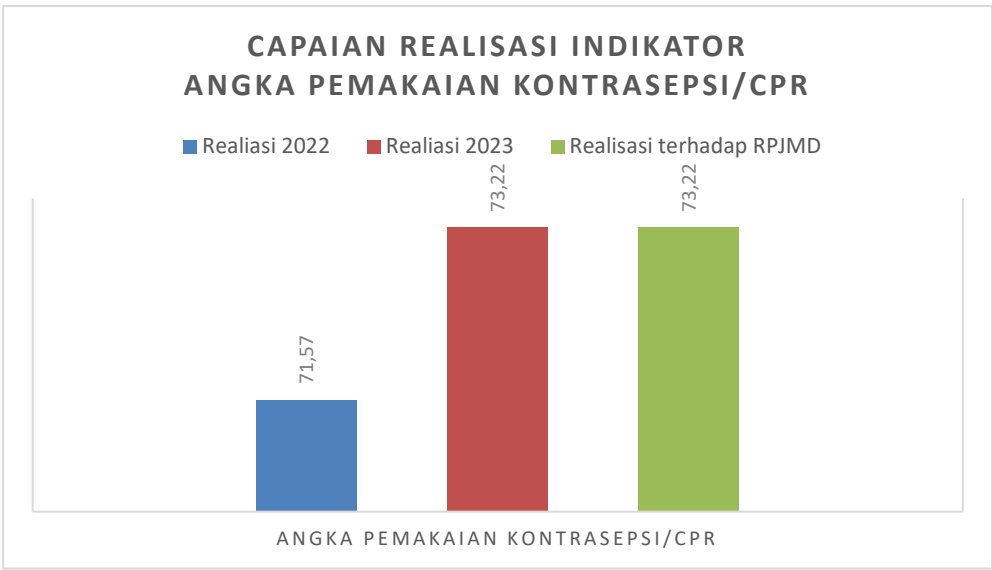
Pemantauan terhadap pelayanan kontrasepsi mutlak diperlukan terutama capaian terhadap peserta KB aktif. Hal ini karena peserta KB aktif memiliki kontribusi besar dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara langsung akan berdampak pada penurunan angka kelahiran. Pemerintah melalui DP3APPKB menekankan penggunaan MKJP bagi

pasangan usia subur (PUS) untuk mengatur kelahiran maupun menghentikan kehamilan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR adalah peningkatan CPR. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR adalah prosentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat KB. Untuk perhitungannya yaitu jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB dibagi dengan jumlah dikalikan dengan 100%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target 76% pada tahun 2023 dan terealisasi sebesar 73,22%. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 96,34% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 96,34%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 belum mencapai target jangka menengah tetapi sudah dalam kategori tinggi, sehingga masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja untuk mewujudkan capaian yang sesuai dengan target (100%).

Pencapaian angka pemakaian kontrasepsi/CPR dibandingkan dengan tahun 2022 pada tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,65 dan capaian meningkat 1,55%, hal ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat KB mengalami peningkatan daripada tahun 2022, juga berdampak dengan adanya peningkatan capaian TFR daripada tahun 2022.



Gambar 3.9 Capaian Realisasi Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

d. **Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga**

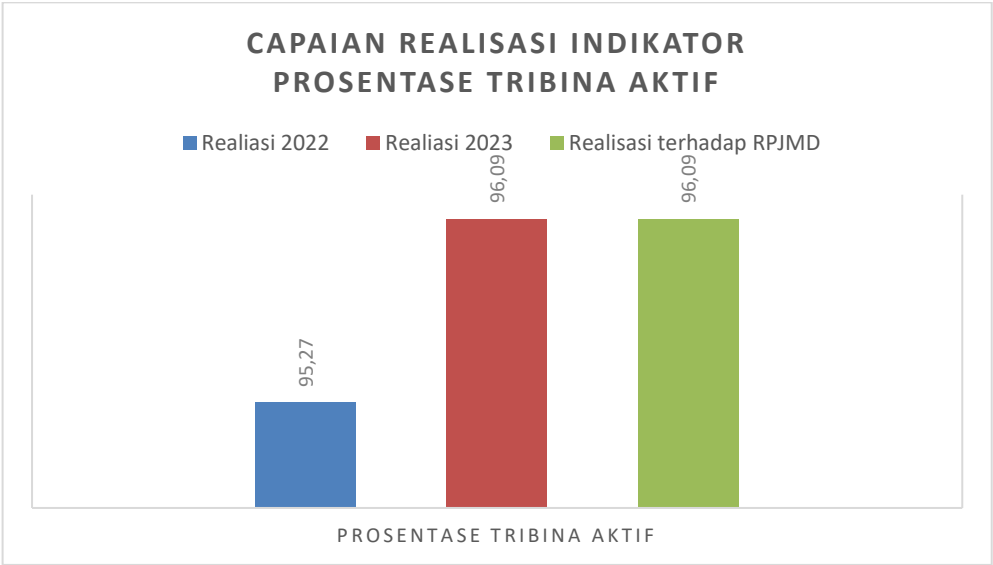
Untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dari program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan Kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Untuk mengukur peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, menggunakan indikator prosentase tribina aktif yang dihitung dengan jumlah poktan aktif dibagi jumlah seluruh poktan yang terbentuk dikali 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target 91% pada tahun 2023 dan terealisasi sebesar 96,09%. Capaian sasaran tahun 2023 sebesar 105,59% dan terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,59%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah tahun.

Pencapaian prosentase tribina aktif dibandingkan dengan tahun 2022 pada tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,82 tetapi mengalami penurunan capaian sebesar 0,27%. Hal ini menunjukkan semakin banyak kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif yang mendukung terlaksananya program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.



Gambar 3.10 Capaian Realisasi Indikator Prosentase Tribina Aktif Tahun 2022, 2023, dan terhadap RPJMD

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak						
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,95	73,69	98,32	Keterukuran melalui dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan telah terukur dengan baik tetapi ada penurunan keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik	Peningkatan kesadaran gender dan pelaksanaan PUG melalui koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi pelaksanaan PUG
2		Prosentase ARG terhadap APBD	7,5	8,69	115,87	Telah dilaksanakan pelatihan penyusunan GAP/GBS tentang adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu program dan kegiatan dalam pembangunan	Telah diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 476/42 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah
3		Kabupaten Layak Anak	780	622,43	79,80	Adanya komitmen dan keseriusan Bupati beserta jajarannya yang berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak	Penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							program pembangunan dengan berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban anak
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0043	0,0042	102,33	Advokasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan serta pendampingan bagi korban kekerasan perempuan yang memerlukan perlindungan bekerjasama dengan lembaga P2TP2A yang sudah difasilitasi melalui nomor hotline	Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencanangan pembentukan DRPPA dengan diterbitkannya Instruksi Bupati 476/42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
5		Kekerasan Anak	0,0076	0,0073	103,95	Koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan pendampingan bagi korban kekerasan anak yang memerlukan perlindungan bekerjasama dengan lembaga P2TP2A yang sudah difasilitasi melalui nomor hotline	Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencanangan pembentukan DRPPA dengan diterbitkannya Instruksi Bupati 476/42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas						
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR	76	73,22	96,34	Akses bagi PUS untuk mendapat pelayanan kontrasepsi jangka panjang terbatas, masalah teknis seperti bidan yang ditempatkan di daerah belum memiliki keahlian pemasangan kontrasepsi MKJP, kurangnya pengetahuan PUS mengenai alat kontrasepsi sehingga masyarakat enggan menggunakan alat dan obat kontrasepsi	Meningkatkan kesertaan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, kompetensi petugas pelayanan KB dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas, pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok sasaran dan fasilitas kesehatan, melaksanakan penggerakan dalam pelayanan KB
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	91	96,09	105,59	Penguatan program pemberdayaan masyarakat dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga	Dilaksanakannya pembinaan dan evaluasi kader Tribina dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) secara periodik.

Apabila dilihat dari tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memetakan langkah-langkah solusi yang perlu dilakukan. Solusi tersebut diatas merupakan strategi peningkatan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan pelayanan Program Bangga Kencana. Sehingga arah kebijakan yang perlu di ambil adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat koordinasi dan komitmen dengan mitra kerja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sampai pada tingkat lini lapangan, termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak								
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,95	73,69	98,32	70.000.000	63.539.800	90,77	16,33
2		Prosentase ARG terhadap APBD	7,5	8,69	115,87				
3		Kabupaten Layak Anak	780	622,43	79,80	105.000.000	70.845.800	67,47	12,33
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan perempuan	0,0043	0,0042	102,33	135.000.000	131.625.000	97,5	4,83
5		Kekerasan Anak	0,0076	0,0073	103,95	35.000.000	27.990.000	79,97	23,98

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas								
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	76	73,22	96,34	8.171.823.300	7.619.911.960	93,25	3,09
7	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	91	96,09	105,59	5.058.400.000	5.023.796.000	99,32	6,27

Keterangan :

Capaian kinerja = realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran = realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator x 100%

Tingkat efisiensi = capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tujuan dan sasaran strategis seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja dengan capaian sangat tinggi. Hal ini terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100,31% dan dengan serapan anggaran 92,51%. Dengan capaian tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran pada setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Analisa Efisiensi Dan Efektif Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.196.506.980	5.352.708.503	100	843.798.477	13,62	86,38		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	69.375.600	100	5.624.400	7,50	92,50		EF&EV
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	69.375.600	100	5.624.400	7,50	92,50	10 laporan	EF&EV
II	Administrasi Keangan Perangkat Daerah	4.314.456.580	3.558.785.768	100	755.670.812	17,51	82,49		EF&EV
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.294.456.580	3.538.850.068	100	755.606.512	17,59	82,41	35 orang/ bulan	EF&EV
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	19.935.700	100	64.300	0,32	99,68	16 laporan	EF&EV
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.687.900	537.298.667	100	40.389.233	6,99	93,01		EF&EV
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.600.000	15.581.000	100	19.000	0,12	99,88	2 paket/ bulan	EF&EV
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.300.000	17.220.920	100	79.080	0,46	99,54	4 paket/ bulan	EF&EV
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000	32.000.000	100	0	0,00	100,00	200 paket	EF&EV
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.672.000	100	2.328.000	11,64	88,36	5 laporan	EF&EV
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.787.900	454.824.747	100	37.963.153	7,70	92,30	40 laporan	EF&EV
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.450.000	140.360.500	100	1.089.500,00	0,77	99,23		EF&EV
	Pengadaan Mebel	10.000.000	9.773.000	100	227.000,00	2,27	97,73	2 unit	EF&EV
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.450.000	130.587.500	100	862.500,00	0,66	99,34	17 unit	EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.800.000	721.412.640	100	20.387.360,00	2,75	97,25		EF&EV
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	39.945.000	100	55.000,00	0,14	99,86	2 laporan/bulan	EF&EV
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.600.000	84.249.440	100	15.350.560,00	15,41	84,59	3 laporan/bulan	EF&EV
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.200.000	597.218.200	100	4.981.800,00	0,83	99,17	4 laporan/bulan	EF&EV
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.112.500	325.475.328	100	20.637.172,00	5,96	94,04		EF&EV
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.500.000	247.058.828	100	20.441.172,00	7,64	92,36	54 unit	EF&EV
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.150.000	27.997.000	100	153.000,00	0,54	99,46	15 unit	EF&EV
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.462.500	50.419.500	100	43.000,00	0,09	99,91	2 unit	EF&EV
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000	63.539.800	100	6.460.200,00	9,23	90,77		EF&EV
VII	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	63.539.800	100	6.460.200,00	9,23	90,77		EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.000.000	13.424.500	100	1.575.500,00	10,50	89,50	40 Dokumen GAP	EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	55.000.000	50.115.300	100	4.884.700,00	8,88	91,12	42 Perangkat Daerah	EF&EV
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35.000.000	31.625.000	100	3.375.000,00	9,64	90,36		EF&EV
VIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17.900.000	100	2.100.000,00	10,50	89,50		EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.550.000	100	450.000,00	9,00	91,00	2 dokumen	EF&EV
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.350.000	100	1.650.000,00	11,00	89,00	20 Perangkat Daerah	EF&EV
IX	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.725.000	100	1.275.000,00	8,50	91,50		EF&EV
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.550.000	100	450.000,00	4,50	95,50	20 Orang	EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	4.175.000	100	825.000,00	16,50	83,50	10 Layanan	EF&EV
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.000.000	100.000.000	100	0,00	0,00	100,00		EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100	0,00	0,00	100,00		EF&EV
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100	0,00	0,00	100,00	1 Layanan	EF&EV
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.000.000	70.845.800	100	34.154.200,00	32,53	67,47		EF&EV
XI	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	36.215.000	100	8.785.000,00	19,52	80,48		EF&EV
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	36.215.000	100	8.785.000,00	19,52	80,48	5 Organisasi	EF&EV
XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	34.630.800	100	25.369.200,00	42,28	57,72		EF&EV
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	34.630.800	100	25.369.200,00	42,28	57,72	16 Dokumen	EF&EV
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	35.000.000	27.990.000	100	7.010.000,00	20,03	79,97		EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.100.000	100	900.000,00	9,00	91,00		EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.100.000	100	900.000,00	9,00	91,00	4 dokumen	EF&EV
XIV	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	8.350.000	100	1.650.000,00	16,50	83,50		EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.350.000	100	1.650.000,00	16,50	83,50	84 Layanan	EF&EV
XV	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	10.540.000	100	4.460.000,00	29,73	70,27		EF&EV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	10.540.000	100	4.460.000,00	29,73	70,27	1 Dokumen	EF&EV
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	375.640.000	367.375.721	100	8.264.279,00	2,20	97,80		EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XVI	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10.000.000	10.000.000	100	0,00	0,00	100,00		EF&EV
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	10.000.000	10.000.000	100	0,00	0,00	100,00	5 Dokumen	EF&EV
XVII	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	365.640.000	357.375.721	100	8.264.279,00	2,26	97,74		EF&EV
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	74.200.000	70.901.250	100	3.298.750,00	4,45	95,55	17 Laporan	EF&EV
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	26.440.000	26.429.000	100	11.000,00	0,04	99,96	17 Dokumen	EF&EV
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	165.000.000	165.000.000	100	0,00	0,00	100,00	17 Kecamatan	EF&EV
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100.000.000	95.045.471	100	4.954.529,00	4,95	95,05	17 Dokumen	EF&EV
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.796.183.300	7.252.536.239	100	543.647.061,00	6,97	93,03		EF&EV
XVIII	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.014.250.000	969.447.185	100	44.802.815,00	4,42	95,58		EF&EV
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	130.000.000	128.104.000	100	1.896.000,00	1,46	98,54	30 Organisasi/orang	EF&EV
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	20.000.000	19.876.500	100	123.500,00	0,62	99,38	17	EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal							Dokumen	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	165.000.000	164.061.935	100	938.065,00	0,57	99,43	17 Dokumen	EF&EV
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	221.000.000	221.000.000	100	0,00	0,00	100,00	17 Laporan	EF&EV
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	398.250.000	356.404.750	100	41.845.250,00	10,51	89,49	17 Laporan	EF&EV
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	100	0,00	0,00	100,00	1 Laporan	EF&EV
XIX	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.288.049.000	1.287.749.000	100	300.000,00	0,02	99,98		EF&EV
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	122.000.000	121.700.000	100	300.000,00	0,25	99,75	177 Desa	EF&EV
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.166.049.000	1.166.049.000	100	0,00	0,00	100,00	1827 Orang	EF&EV
XX	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.508.884.300	4.010.521.004	100	498.363.296,00	11,05	88,95		EF&EV
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.100.000	46.290.000	100	6.810.000,00	12,82	87,18	12 Laporan	EF&EV
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	2.149.189.300	1.820.668.246	100	328.521.054,00	15,29	84,71	440 PUS	EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(MKJP)								
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	1.500.000	101	3.500.000,00	70,00	30,00	10 Laporan akseptor	EF&EV
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.184.995.000	2.025.462.758	100	159.532.242,00	7,30	92,70	51 Paket	EF&EV
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39.100.000	39.100.000	100	0,00	0,00	100,00	12 Laporan	EF&EV
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	5.000.000	5.000.000	100	0,00	0,00	100,00	1000 Orang	EF&EV
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	72.500.000	72.500.000	100	0,00	0,00	100,00	50 Akseptor	EF&EV
XXI	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	985.000.000	984.819.050	100	180.950,00	0,02	99,98		EF&EV
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	24.000.000	23.819.050	100	180.950,00	0,75	99,25	2 Dokumen	EF&EV
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	961.000.000	961.000.000	100	0,00	0,00	100,00	64 Kampung	EF&EV
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.058.400.000	5.023.796.000	100	34.604.000,00	0,68	99,32		EF&EV
XXII	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.938.400.000	4.904.216.000	100	34.184.000,00	0,69	99,31		EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	349.200.000	100	10.800.000,00	3,00	97,00	20 Paket BKB Kit	EF&EV
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	0	101	15.000.000,00	100,00	0,00	170 Orang	EF&EV
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.543.400.000	4.535.300.000	100	8.100.000,00	0,18	99,82	40972 Orang	EF&EV
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	9.802.000	100	198.000,00	1,98	98,02	1 Laporan	EF&EV
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.000.000	9.914.000	100	86.000,00	0,86	99,14	1 Laporan	EF&EV

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXIII	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120.000.000	119.580.000	100	420.000,00	0,35	99,65		EF&EV
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	10.000.000	100	0,00	0,00	100,00	1 Laporan	EF&EV
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	100.000.000	100	0,00	0,00	100,00	2 Laporan	EF&EV
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000	9.580.000	100	420.000,00	4,20	95,80	1 Laporan	EF&EV

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap kegiatan telah berjalan maksimal sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Capaian dari masing-masing kegiatan rata-rata 90%, bahkan terdapat kegiatan yang mencapai angka 100% pada Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan. Dengan capaian dan serapan anggaran tersebut menandakan program ini telah berjalan efektif dan efisien.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 5 program yang telah direalisasikan dengan baik. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas

Keluarga realisasinya mencapai rata-rata 93,71% tetapi pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak belum berjalan maksimal dengan capaiannya yang hanya mencapai 67,47% dan 79,97%. Hal ini terjadi hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran perubahan tetapi tidak bisa terlaksana dengan maksimal sampai dengan akhir tahun.

Pada Program Pengendalian Penduduk dengan dua kegiatan yang keduanya telah berjalan maksimal terlihat dari serapan anggaran yang mencapai 97,80% sehingga program ini telah berjalan efektif dan efisien. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan empat Kegiatan yang telah berjalan maksimal dan capaiannya sudah efektif dan efisien. Capaian pada masing-masing kegiatan mencapai 93,03%. Untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki capaian sebesar 99,32% yang termasuk sangat baik.

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak								
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	98,32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	70	90,77	Menunjang	Penentuan target jumlah OPD yang terlalu besar karena dahulu Kelurahan termasuk dalam OPD sedangkan saat ini tidak.
		Prosentase ARG terhadap APBD	115,87						

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
2		Kabupaten Layak Anak	79,80	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase desa layak anak	7,53	67,47	Menunjang	Belum adanya dukungan anggaran untuk pembentukan desa layak anak
3	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan Perempuan	102,33	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan	102,33	90,36	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencanangan pembentukan DRPPA terlaksana dengan baik
4				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Angka Perceraian	188,92	100,00	Menunjang	Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG terlaksana dengan baik
5		Kekerasan Anak	103,95	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase kasus kekerasan anak	103,95	79,97	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencanangan pembentukan DRPPA terlaksana dengan baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas								
6	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	96,34	Program Pengendalian Penduduk	Rasio KB	125	97,80	Menunjang	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi serta advokasi program Bangga Kencana yang telah berhasil menysasar kepada pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu
7				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase KB MKJP	100,79	93,03	Menunjang	Penggunaan MKJP bagi PUS terlaksana dengan baik karena MKJP paling efektif untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk
8	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase Tribina Aktif	105,59	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	Prosentase tribina aktif	105,59	99,32	Menunjang	Penguatan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
				Sejahtera (KS)					dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga

Pada tujuan meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak serta sasaran meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan ada 1 (satu) program yang belum menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Hal ini dikarenakan baru terbentuk 2 desa layak anak yaitu Desa Dayu dan Desa Jatipurwo dari 177 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Karanganyar, hal ini dikarenakan belum adanya dukungan penuh anggaran untuk pembentukannya. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan Renja. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 5 (lima) indikator yang realisasinya melampaui target dan hanya 2 (dua) indikator yang tidak berhasil mencapai target tetapi sudah dalam kategori pencapaian yang sangat tinggi. Dan dari seluruh Program yang menunjang kinerja ini rata-rata sudah di atas 100%.

C. Akuntabilitas Anggaran

1. Anggaran Belanja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Adapun realisasi anggaran belanja tahun 2023 sesuai Tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	19.771.730.280,00	18.290.417.063,00	92,51 %	1.481.313.217,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	17.562.700.280,00	16.235.682.105,00	92,44 %	1.327.018.175,00
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	4.299.256.580,00	3.542.850.068,00	82,41 %	756.406.512,00
5 . 1 . 02	Belanja Barang	13.163.443.700,00	12.592.832.037,00	95,67 %	570.611.663,00
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	0.00
5 . 2	BELANJA MODAL	2.209.030.000,00	2.054.734.958,00	93,02 %	154.295.042,00
5 . 2 . 02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.499.030.000,00	1.416.696.295,00	94,51 %	82.333.705,00
5 . 2 . 03	Belanja Gedung dan Bangunan	710.000.000,00	638.038.663,00		71.961.337,00
SURPLUS / (DEFISIT)		19.771.730.280,00	18.290.417.063,00	87,10 %	1.481.313.217,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

Per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5	BELANJA DAERAH	19.771.730.280,00	18.290.417.063,00	92,51	(1.481.313.217)
5.1	BELANJA OPERASI	17.562.700.280,00	16.235.682.105,00	92,44	(1.327.018.175)
5.1.01	Belanja Pegawai	4.299.256.580,00	3.542.850.068,00	82,41	(756.406.512)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.982.380,00	2.128.528.834,00	83,44	(422.453.546)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.933.696.336,00	1.646.400.880,00	85,14	(287.295.456)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.933.696.336,00	1.646.400.880,00	85,14	(287.295.456)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.033.189,00	101.341.200,00	83,04	(20.691.989)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.033.189,00	101.341.200,00	83,04	(20.691.989)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	227.630.470,00	170.910.000,00	75,08	(56.720.470)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	227.630.470,00	170.910.000,00	75,08	(56.720.470)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.730.100,00	13.780.000,00	77,72	(3.950.100)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.730.100,00	13.780.000,00	77,72	(3.950.100)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.435.310,00	33.495.000,00	97,27	(940.310)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.435.310,00	33.495.000,00	97,27	(940.310)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.052.852,00	65.105.580,00	84,49	(11.947.272)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.052.852,00	65.105.580,00	84,49	(11.947.272)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.717.204,00	16.804.430,00	85,23	(2.912.774)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.717.204,00	16.804.430,00	85,23	(2.912.774)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.329,00	24.080,00	98,98	(249)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.329,00	24.080,00	98,98	(249)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.776.992,00	67.287.353,00	72,53	(25.489.639)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	92.776.992,00	67.287.353,00	72,53	(25.489.639)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.666.064,00	3.345.083,00	71,69	(1.320.981)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.666.064,00	3.345.083,00	71,69	(1.320.981)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.998.234,00	10.035.228,00	71,69	(3.963.006)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.998.234,00	10.035.228,00	71,69	(3.963.006)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.221.300,00	0,00	0,00	(7.221.300)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.221.300,00	0,00	0,00	(7.221.300)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.292.575.700,00	1.213.546.234,00	93,89	(79.029.466)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.428.900,00	96.687.779,00	97,24	(2.741.121)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	99.428.900,00	96.687.779,00	97,24	(2.741.121)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.000.000,00	9.215.380,00	92,15	(784.620)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.000.000,00	9.215.380,00	92,15	(784.620)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.183.146.800,00	1.107.643.075,00	93,62	(75.503.725)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.183.146.800,00	1.107.643.075,00	93,62	(75.503.725)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	455.698.500,00	200.775.000,00	44,06	(254.923.500)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	353.341.375,00	172.825.000,00	48,91	(180.516.375)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	279.584.250,00	154.375.000,00	55,22	(125.209.250)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	73.757.125,00	18.450.000,00	25,01	(55.307.125)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	102.357.125,00	27.950.000,00	27,31	(74.407.125)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	102.357.125,00	27.950.000,00	27,31	(74.407.125)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.163.443.700,00	12.592.832.037,00	95,67	(570.611.663)
5.1.02.01	Belanja Barang	2.621.981.400,00	2.525.897.929,00	96,34	(96.083.471)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.621.981.400,00	2.525.897.929,00	96,34	(96.083.471)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	43.084.400,00	43.082.000,00	99,99	(2.400)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	120.550.500,00	114.308.128,00	94,82	(6.242.372)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.260.000,00	10.185.000,00	99,27	(75.000)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.960.100,00	2.956.020,00	99,86	(4.080)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	129.534.500,00	127.690.000,00	98,58	(1.844.500)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.014.000,00	36.322.000,00	98,13	(692.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.998.100,00	80.983.200,00	97,57	(2.014.900)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	56.386.600,00	56.112.300,00	99,51	(274.300)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	376.323.900,00	370.860.735,00	98,55	(5.463.165)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.617.000,00	13.295.500,00	97,64	(321.500)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.442.025,00	19.341.825,00	99,48	(100.200)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.110.900,00	13.091.900,00	99,86	(19.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	43.750.000,00	43.567.500,00	99,58	(182.500)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	418.160.000,00	407.140.446,00	97,36	(11.019.554)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.290.000,00	18.290.000,00	100,00	0
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.054.375,00	3.054.375,00	100,00	0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.209.970.000,00	1.144.470.000,00	94,59	(65.500.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.875.000,00	17.547.000,00	88,29	(2.328.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.064.837.300,00	6.824.347.861,00	96,60	(240.489.439)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.876.542.300,00	6.641.652.861,00	96,58	(234.889.439)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.750.000,00	63.425.000,00	64,88	(34.325.000)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.870.200.000,00	2.870.200.000,00	100,00	0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.607.300,00	9.566.700,00	99,58	(40.600)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.840.000,00	149.560.000,00	99,15	(1.280.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.200.000,00	366.300.000,00	99,75	(900.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	42.000.000,00	39.200.000,00	93,33	(2.800.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	50.000.000,00	49.783.500,00	99,57	(216.500)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.140.000,00	394.327,00	9,52	(3.745.673)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.460.000,00	4.340.400,00	18,50	(19.119.600)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	102.600.000,00	72.202.294,00	70,37	(30.397.706)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.258.400.000,00	2.249.542.640,00	99,61	(8.857.360)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	28.000.000,00	16.080.000,00	57,43	(11.920.000)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	848.645.000,00	727.358.000,00	85,71	(121.287.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.450.000,00	13.450.000,00	100,00	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.920.000,00	5.920.000,00	100,00	0
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.920.000,00	5.920.000,00	100,00	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	94.400.000,00	99,37	(600.000)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	70.000.000,00	69.400.000,00	99,14	(600.000)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	66.425.000,00	61.425.000,00	92,47	(5.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	66.425.000,00	61.425.000,00	92,47	(5.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	120.194.000,00	113.098.750,00	94,10	(7.095.250)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.194.000,00	113.098.750,00	94,10	(7.095.250)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.074.000,00	85.131.750,00	92,46	(6.942.250)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.500.000,00	10.436.000,00	99,39	(64.000)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00	480.000,00	96,00	(20.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	10.160.000,00	99,41	(60.000)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.891.000,00	99,87	(9.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.440.631.000,00	2.266.087.497,00	92,85	(174.543.503)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.440.631.000,00	2.266.087.497,00	92,85	(174.543.503)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	531.311.000,00	491.213.497,00	92,45	(40.097.503)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.821.460.000,00	1.687.039.000,00	92,62	(134.421.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	87.860.000,00	87.835.000,00	99,97	(25.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	915.800.000,00	863.400.000,00	94,28	(52.400.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162.500.000,00	110.100.000,00	67,75	(52.400.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	45.000.000,00	30.000.000,00	66,67	(15.000.000)
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	81.500.000,00	44.100.000,00	54,11	(37.400.000)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	753.300.000,00	753.300.000,00	100,00	0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	753.300.000,00	753.300.000,00	100,00	0
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0
5,2	BELANJA MODAL	2.209.030.000,00	2.054.734.958,00	93,02	(154.295.042)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.499.030.000,00	1.416.696.295,00	94,51	(82.333.705)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	16.000.000,00	15.500.000,00	96,88	(500.000)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	16.000.000,00	15.500.000,00	96,88	(500.000)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	16.000.000,00	15.500.000,00	96,88	(500.000)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.000.000.000,00	924.000.000,00	92,40	(76.000.000)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000.000,00	924.000.000,00	92,40	(76.000.000)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000.000,00	924.000.000,00	92,40	(76.000.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	329.390.000,00	324.537.600,00	98,53	(4.852.400)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	248.550.000,00	245.088.000,00	98,61	(3.462.000)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.650.000,00	26.080.000,00	97,86	(570.000)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	221.900.000,00	219.008.000,00	98,70	(2.892.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.590.000,00	61.551.600,00	98,34	(1.038.400)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.500.000,00	40.026.600,00	98,83	(473.400)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.090.000,00	17.525.000,00	96,88	(565.000)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.250.000,00	17.898.000,00	98,07	(352.000)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.250.000,00	11.950.000,00	97,55	(300.000)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00	5.948.000,00	99,13	(52.000)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.000.000,00	29.608.695,00	98,70	(391.305)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	30.000.000,00	29.608.695,00	98,70	(391.305)
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	30.000.000,00	29.608.695,00	98,70	(391.305)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	123.400.000,00	122.810.000,00	99,52	(590.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	91.500.000,00	91.030.000,00	99,49	(470.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	91.500.000,00	91.030.000,00	99,49	(470.000)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.900.000,00	31.780.000,00	99,62	(120.000)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.012.500,00	4.000.000,00	99,69	(12.500)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	27.887.500,00	27.780.000,00	99,61	(107.500)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	240.000,00	240.000,00	100,00	0
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	240.000,00	240.000,00	100,00	0
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	240.000,00	240.000,00	100,00	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	710.000.000,00	638.038.663,00	89,86	(71.961.337)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	710.000.000,00	638.038.663,00	89,86	(71.961.337)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	710.000.000,00	638.038.663,00	89,86	(71.961.337)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	710.000.000,00	638.038.663,00	89,86	(71.961.337)
SURPLUS / DEFISIT		(19.771.730.280,00)	(18.290.417.063,00)	92,51	1.481.313.217
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(19.771.730.280,00)	(18.290.417.063,00)	92,51	1.481.313.217

2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran ini memuat penjelasan terkait pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Karanganyar. Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.196.506.980	5.352.708.503	86,38	843.798.477
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	69.375.600	92,50	5.624.400
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	69.375.600	92,50	5.624.400
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.314.456.580	3.558.785.768	82,49	755.670.812
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.294.456.580	3.538.850.068	82,41	755.606.512
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	19.935.700	99,68	64.300
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.687.900	537.298.667	93,01	40.389.233
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.600.000	15.581.000	99,88	19.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.300.000	17.220.920	99,54	79.080
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000	32.000.000	100,00	0
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.672.000	88,36	2.328.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.787.900	454.824.747	92,30	37.963.153
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.450.000	140.360.500	99,23	1.089.500,00
1	Pengadaan Mebel	10.000.000	9.773.000	97,73	227.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.450.000	130.587.500	99,34	862.500,00
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.800.000	721.412.640	97,25	20.387.360,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	39.945.000	99,86	55.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.600.000	84.249.440	84,59	15.350.560,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.200.000	597.218.200	99,17	4.981.800,00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.112.500	325.475.328	94,04	20.637.172,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.500.000	247.058.828	92,36	20.441.172,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.150.000	27.997.000	99,46	153.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.462.500	50.419.500	99,91	43.000,00
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000	63.539.800	90,77	6.460.200,00
I	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	63.539.800	90,77	6.460.200,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.000.000	13.424.500	89,50	1.575.500,00
2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	55.000.000	50.115.300	91,12	4.884.700,00
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35.000.000	31.625.000	90,36	3.375.000,00
I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17.900.000	89,50	2.100.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.550.000	91,00	450.000,00
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.350.000	89,00	1.650.000,00
II	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.725.000	91,50	1.275.000,00
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.550.000	95,50	450.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	4.175.000	83,50	825.000,00
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.000.000	100.000.000	100,00	0
I	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	100.000.000	100.000.000	100,00	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
	Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00	0
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.000.000	70.845.800	67,47	34.154.200,00
I	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	36.215.000	80,48	8.785.000,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	36.215.000	80,48	8.785.000,00
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	34.630.800	57,72	25.369.200,00
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	34.630.800	57,72	25.369.200,00
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	35.000.000	27.990.000	79,97	7.010.000,00
I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.100.000	91,00	900.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.100.000	91,00	900.000,00
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	8.350.000	83,50	1.650.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.350.000	83,50	1.650.000,00
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	10.540.000	70,27	4.460.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	10.540.000	70,27	4.460.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	375.640.000	367.375.721	97,80	8.264.279,00
I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10.000.000	10.000.000	100,00	0
1	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	10.000.000	10.000.000	100,00	0
II	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	365.640.000	357.375.721	97,74	8.264.279,00
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	74.200.000	70.901.250	95,55	3.298.750,00
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	26.440.000	26.429.000	99,96	11.000,00
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	165.000.000	165.000.000	100,00	0
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100.000.000	95.045.471	95,05	4.954.529,00
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.796.183.300	7.252.536.239	93,03	543.647.061,00
I	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.014.250.000	969.447.185	95,58	44.802.815,00
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	130.000.000	128.104.000	98,54	1.896.000,00
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	20.000.000	19.876.500	99,38	123.500,00
3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	165.000.000	164.061.935	99,43	938.065,00
4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	221.000.000	221.000.000	100,00	0
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	398.250.000	356.404.750	89,49	41.845.250,00
6	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	100,00	0
II	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.288.049.000	1.287.749.000	99,98	300.000,00
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	122.000.000	121.700.000	99,75	300.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.166.049.000	1.166.049.000	100,00	0
III	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.508.884.300	4.010.521.004	88,95	498.363.296,00
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.100.000	46.290.000	87,18	6.810.000,00
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.149.189.300	1.820.668.246	84,71	328.521.054,00
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	1.500.000	30,00	3.500.000,00
4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.184.995.000	2.025.462.758	92,70	159.532.242,00
5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39.100.000	39.100.000	100,00	0
6	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	5.000.000	5.000.000	100,00	0
7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	72.500.000	72.500.000	100,00	0
IV	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	985.000.000	984.819.050	99,98	180.950,00
1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	24.000.000	23.819.050	99,25	180.950,00
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	961.000.000	961.000.000	100,00	0
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.058.400.000	5.023.796.000	99,32	34.604.000,00
I	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.938.400.000	4.904.216.000	99,31	34.184.000,00
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	349.200.000	97,00	10.800.000,00
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	15.000.000	0	0,00	15.000.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.543.400.000	4.535.300.000	99,82	8.100.000,00
4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	9.802.000	98,02	198.000,00
5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.000.000	9.914.000	99,14	86.000,00
II	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120.000.000	119.580.000	99,65	420.000,00
1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	10.000.000	100,00	0
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	100.000.000	100,00	0
3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000	9.580.000	95,80	420.000,00
		19.771.730.280	18.290.417.063	92,51	1.481.313.217

Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 capaiannya sebesar 92,51%. Capaian ini menunjukkan capaian serapan anggaran yang sangat tinggi tetapi masih diperlukan upaya peningkatan penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja yang lebih baik. Capaian tersebut dikarenakan pada sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota penyerapannya rendah yaitu 57,72% hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran perubahan pada sub kegiatan tersebut yang tidak bisa terlaksana dengan maksimal pada sisa waktu yang ada. Dan pada sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dikarenakan pada tahun 2023 untuk kegiatan tersebut sudah *tercover* dari anggaran BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Rencana Strategis 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis, kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata tercapai **100,31%** atau kategori **“Sangat Tinggi”**. Untuk pencapaian target kinerja untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.771.730.280,- dan terealisasi Rp 18.290.417.063,- dengan capaian **92,51%**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Seksi serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada Tahun 2023 progres penyelesaian terhadap Isu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Peningkatan frekuensi kegiatan advokasi dan KIE Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi semua lapisan masyarakat.
3. Mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi wilayah.
4. Mengaktifkan kegiatan Pusat Konsultasi Remaja.

5. Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan bagi petugas pengelola dan pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan.
6. Percepatan pelaksanaan pengotimalan Kampung KB (Keluarga Berkualitas).

Karanganyar, Februari 2024

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR



RUSMANTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199303 1 016